

Analisis Penerapan Aplikasi SIMDA BMD Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pegawai Guna Memaksimalkan Pemanfaatan Aset Daerah (Studi Kasus BKAD Kabupaten Bintan)

Fauzan Fadillah Di Harjo

Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang

Desfina Desfina

Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang

Korespondensi penulis : Fauzanfadillahdiharjo@gmail.com

Abstract: *Planning and reporting performance results in local government using information systems. The purpose of conducting research is to obtain an overview of the results of accountability for employee performance with the help of implementing SIMDA BMD at the Regional Financial and Asset Agency of the Bintan Regency Government. It is hoped that the presence of the SIMDA application can help the government in managing finances, especially in employee performance accountability and providing ideal management information. Data collection was collected using literature studies, interviews, observation and documentation. The results of this research show that SIMDA BMD (Regional Property Management Information System) in the financial management process, especially financial reporting, continues to run well and cannot yet be said to be fully effective, this is due to various obstacles that occur.*

Keywords: *SIMDA BMD, Performance Accountability, Regional Assets*

Abstrak. Penelitian ialah untuk memperoleh gambaran hasil pertanggungjawaban atas kinerja pegawai dengan bantuan penerapan Aplikasi SIMDA BMD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan. Kehadiran Aplikasi SIMDA diharapkan dapat membantu pemerintah dalam pengelolaan keuangan, khususnya pada akuntabilitas kinerja pegawai serta adanya informasi manajemen yang ideal. Pengumpulan data dikumpulkan dengan menggunakan studi literature, wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa SIMDA BMD (Sisitem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah) dalam proses pengelolaan keuangan khususnya pelaporan keuangan tetap berjalan dengan baik dan masih belum dapat dikatakan efektif sepenuhnya, hal ini dikarenakan adanya berbagai kendala yang terjadi.

Kata kunci: *SIMDA BMD, Akuntabilitas Kinerja, Aset Daerah*

PENDAHULUAN

Awal era reformasi ditandai dengan pergantian pemerintahan Orde Baru ke Orde Reformasi yang terjadi pada tahun 1998. Salah satu bentuk reformasi yang terjadi di Indonesia adalah reformasi pemerintahan yang juga ditandai dengan pemberian otonomi daerah yang luas kepada pemerintah daerah. . Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk secara mandiri mempunyai hak mengatur, mengurus, dan mengurus urusan nasional. Dari pengertian otonomi daerah dapat dipahami bahwa daerah mempunyai hak dan kewenangan penuh untuk mengurus rumah tangganya sendiri tanpa adanya campur tangan pemerintah pusat. Salah satu yang dapat dilakukan daerah adalah mengelola dan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, peraturan kinerja menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja instansi pemerintah.

Revolusi industri digital 4.0 kini sudah cukup dahsyat sehingga aktor pemerintah tidak bisa tinggal diam dalam menghadapinya, sehingga diperlukan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang transparan dan akuntabel. Hal ini tentunya sesuai dengan tugas BPKP dalam menjalankan fungsi penjaminan dan konsultasi terhadap program dan kebijakan pemerintah daerah. Di sisi lain, masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama dalam pembangunan daerah harus dapat turut serta memantau dan menyalurkan aspirasi, baik melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun melalui jalur komunikasi perencanaan lainnya. Tanpa media yang tepat untuk menjangkau masyarakat, partisipasi menjadi tersegmentasi dan tidak inklusif. Melihat permasalahan yang terjadi diatas, maka urgensi penerapan e-Planning di Lingkungan Pemerintah Daerah menjadi sangat penting dan sangat dibutuhkan.

Selain itu, guna membantu kinerja pemerintah daerah dalam pengamanan aset secara administratif, Pemerintah Kabupaten Bintan memanfaatkan Aplikasi SIMDA BMD (Sistem Informasi dan Pengelolaan Barang Milik Daerah) yang dikembangkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Pada aplikasi ini dilengkapi dengan coding Barang. Pada aplikasi SIMDA BMD juga telah dibuat berbagai informasi terkait barang daerah antara lain jenis barang, kode lokasi, tanggal pembukuan, tanggal perolehan, merk, tipe, bahan, nomor rangka, nomor mesin, nomor BPKB (untuk kendaraan).), harga perolehan, asal barang dan informasi lain yang diperlukan.

Ledvina V. Carino (2002) mengatakan akuntabilitas adalah suatu evolusi kegiatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang masih sesuai dengan kewenangannya atau sudah jauh melampaui tanggung jawab dan wewenangnya. Setiap orang harus benar-benar menyadari bahwa setiap tindakan yang dilakukannya tidak hanya akan berdampak pada dirinya sendiri, namun juga harus menyadari bahwa tindakannya akan memberikan dampak yang signifikan bagi orang lain. Oleh karena itu, dalam setiap perilakunya, seorang pejabat pemerintah harus memperhatikan lingkungannya. Selain itu, dengan teori lain yaitu J.B. Gharthey (1998) disebutkan bahwa akuntabilitas bertujuan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penatalayanan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut meliputi apa, mengapa, kepada siapa, ke mana, yang mana dan bagaimana pertanggungjawaban harus dilaksanakan.

Terdapat beberapa permasalahan yang timbul dalam proses penatausahaan Barang Milik Daerah dengan menggunakan aplikasi SIMDA BMD, antara lain:

1. Dalam proses penatausahaan yang dilakukan oleh pegawai, sering terjadi kesalahan mengenai barang milik daerah karena kurangnya ketelitian dari pihak Pengguna Barang Pelaksana dan kurangnya pemahaman terhadap kodifikasi barang milik daerah. Kesalahan yang sering terjadi antara lain kesalahan dalam memasukkan harga, pencatatan ganda, kesalahan tanggal perolehan dan tanggal pembukuan, serta kesalahan dalam pemilihan kode barang.
2. SIMDA BMD belum terintegrasi dengan sistem pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten Bintan yang dikelola oleh Bagian Akuntansi. Hal ini tentunya memerlukan beberapa penyesuaian dan dukungan kerja agar dapat menjadi landasan dan bahan penyeteraan data antara Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Bidang Akuntansi.
3. Masih ada aset daerah yang kosong dan belum direncanakan penggunaannya. Jadi tidak berpotensi menimbulkan ketegangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan metodologi kualitatif dapat diartikan sebagai suatu prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lokasi penelitian ini akan menjadi fokus objek penelitian yang bertempat di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bintan. Data yang telah terkumpul dikumpulkan dengan menggunakan metode kualitatif yaitu pengumpulan informasi, baik data yang diperoleh melalui observasi maupun wawancara. Sedangkan jenis data yang akan dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan berupa dokumentasi atau bahan tertulis yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode purposive sampling, dimana metode ini mengambil sampel dengan cara menentukan key informan atau informasi kunci yang dapat dipandang sebagai sumber data yang paling tepat untuk permasalahan yang diteliti. Dalam teknik ini data yang mendalam dapat diperoleh jika informan mengetahui masalah yang diteliti, dengan demikian data yang diperoleh akan lebih lengkap.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan SIMDA Keuangan sebagai sistem informasi, akuntansi daerah dapat membuat pelaporan dan tugas pengelolaan

untuk daerah keuangan dan pengendalian internal menjadi lebih mudah sistem diterapkan untuk mencapai tujuan pelaporan dan ruang lingkup analisis, kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem tersebut.

HASIL

Definisi SIMDA

Djaja (2009) dalam Budiman dan Arza (2013) menyatakan bahwa Aplikasi SIMDA adalah database aplikasi yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan keuangan di lingkungan Satuan Kerja. Perangkat Daerah (SKPD). Aplikasi SIMDA dikembangkan dengan perhatian dan penerapan Sistem Pengendalian untuk Urusan Dalam Negeri Pemerintahan (SPIP). Karena itu Kontrol atas aplikasi menjadi suatu keharusan untuk dijadikan sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam menerapkan Sistem Pengendalian

Urusan Dalam Negeri Pemerintahan (SPIP). Karena itu kontrol atas aplikasi menjadi suatu keharusan untuk berfungsi sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaannya.

Dampak yang dihasilkan dari penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah dapat menghasilkan faktor keberhasilan akuntabilitas kinerja pegawai pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Pada penjelasan kali ini kami akan menguraikan akuntabilitas kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 untuk mengukur pencapaian hasil kinerja.

Indikator Akuntabilitas Kinerja

Pengelolaan Aset Daerah merupakan salah satu indikator penting dalam konteks neraca pemerintahan daerah. Penetapan nilai barang daerah perlu dilakukan agar dapat dilakukan penyusutan. Peningkatan pengelolaan aset meliputi pengendalian, inventarisasi, dan penilaian Barang Milik Daerah. Terdapat pola tertib administrasi sumber daya daerah. Pengkodean data dilakukan untuk tujuan pemanfaatan, setelah itu permasalahan yang dijelaskan pada bagian Pendahuluan diselesaikan. Pengembangan sistem aplikasi yaitu SIMDA BMD dilakukan untuk memastikan tersedianya data dari data aset akrual yang disinkronkan. Dengan memberikan pengamanan terhadap Barang Milik Daerah yang meliputi penanganan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum, serta menjamin kepastian status kepemilikan barang milik Daerah. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan melakukan kerjasama dengan konsultan/rekan yang memberikan jasa pengembangan aplikasi dan pemeliharaan perangkat lunak. Peningkatan pengetahuan dan wawasan yang dimiliki aparaturnya mengenai pengelolaan

barang milik daerah masih perlu dilakukan mengingat seringnya terjadi perubahan peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dengan adanya pemberian bimbingan teknis keuangan dan aset daerah bagi SKPD/OPD di lingkungan kerja, maka perlu juga ditingkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota lain atau lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana aset daerah.

Terlebih lagi, masih terdapat kebutuhan yang signifikan untuk perbaikan pemetaan yang dapat dilakukan dalam penatausahaan barang milik daerah melalui aplikasi SIMDA BMD. SKPD/OPD banyak mengalami kesulitan dalam melakukan pencatatan inventarisasi, solusi dari permasalahan tersebut adalah memastikan data barang milik daerah sesuai dengan neraca.

Indikator Transparansi

Krina (2003:16-17) menyatakan bahwa ada beberapa alat ukur untuk transparansi, yaitu:

1. Publikasi kebijakan publik melalui alat komunikasi: laporan tahunan, brosur, selebaran, pusat informasi, telepon bebas pulsa, liputan media, iklan layanan masyarakat, website, papan pengumuman, surat kabar lokal.
2. Informasi yang disajikan: referensi layanan, data pemeliharaan, laporan tentang kegiatan umum, prosedur pengaduan.
3. Penanganan pengaduan: berita kota di media massa dan lokal, tanggapan pemberitahuan, tenggat waktu tanggapan, pengumpulan pendapat dan survei tentang isu-isu kebijakan publik, komentar dan catatan terhadap rancangan kebijakan dan peraturan, survei pengguna jasa.
4. Lembaga dan Organisasi Daerah: Bawasda, Kantor PMD/BPM, Kantor Humas, Layanan Komunikasi dan Informasi, Forum Lintas Aktor.
5. Pertemuan komunitas.
6. Mimbar Rakyat.

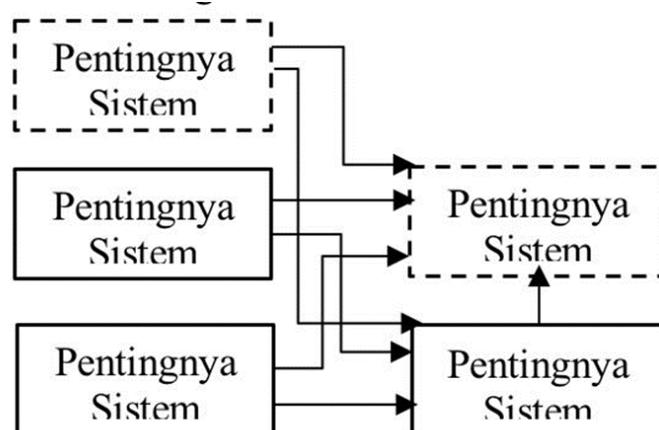
Melalui penjelasan Krina di atas dapat dipahami bahwa pemerintah daerah harus dapat memuaskan keingintahuan masyarakat tentang hal tersebut. Menyebarkan pemerintahan daerahnya secara transparan, melaporkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga bagaimana pemerintah daerah dapat mengetahui aspirasi masyarakat. Menyediakan sarana bagi masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi dalam mengendalikan pemerintahan desanya sendiri. Sistem Informasi yang berkaitan dengan

Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah menjadi sangat penting bagi pengguna, seperti sistem manual dan Manajemen Pedoman Keuangan Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman untuk pengelolaan keuangan daerah mencakup kegiatan penganggaran dan prosedur administrasi keuangan untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran bisnis tunai), dan pelaporan atau prosedural akuntansi.

Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terpadu, meliputi penganggaran, administrasi, akuntansi dan pelaporan. Untuk mengetahui penerapan SIMDA Keuangan sebagai sistem informasi, akuntansi daerah dapat membuat pelaporan dan tugas pengelolaan untuk daerah keuangan dan pengendalian internal menjadi lebih mudah. Sistem diterapkan untuk mencapai tujuan pelaporan dan ruang lingkup analisis, kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem. Kualitas informasi dihasilkan setelahnya. setelah menggunakan aplikasi lebih relevan, akurat dan tepat waktu. Hal ini sesuai dengan amanah an konsep yang telah diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 2007 dan juga Akuntansi Pemerintahan Standar dalam PP no. 24 Tahun 2005. Seddon dan Kiew (1994) mengembangkan model kesuksesan sistem sebagai berikut :

Gambar 1

Model Kesuksesan Sistem Informasi Seddon & Kiew (1994)



Sumber : Seddon dan Kiew (1994)

KESIMPULAN

Secara kualitas pencapaian sasaran strategis telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, walaupun masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki antara lain, adapun untuk mencapai target kinerja instansi untuk dapat memanfaatkan penggunaan SIMDA BMD dalam meningkatkan Akuntabilitas pegawai maka upaya yang dapat dilakukan adalah:

1. Adanya strategi dalam penguatan SKPD/OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bintan melalui koordinasi, konsultasi dengan pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat dalam rangka evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta dapat melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pegawai akan aplikasi SIMDA.
2. Karena dalam hal tersebut masih terdapat kesalahan dalam penggunaan aplikasi maka diharapkan kedepannya akan ada pengembangan sistem informasi pengelolaan aset daerah dan barang milik daerah. Serta
3. Adanya penguatan kualitas aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah agar lebih bersinergi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi menjawab tantangan atas perubahan regulasi tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Bintan.

DAFTAR REFERENSI

- (Bkad), B. K. (N.D.). Retrieved Desember 18, 2023, From [Https://Bkad.Bintankab.Go.Id/](https://Bkad.Bintankab.Go.Id/)
- Ghifari, A., & Faqih, M. (2022, October 11). Tinjauan Pelaksanaan Sewa Alat Dan Mesin Pertanian Di Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung. *Thesis (Ktta) Politeknik Keuangan Negara Stan*, 7-12. Retrieved Desember 18, 2023, From [Http://Eprints.Pknstan.Ac.Id/Eprint/226](http://Eprints.Pknstan.Ac.Id/Eprint/226)
- Mda, Ph. D, P. I. (2016). *Birokrasi Akuntabilitas Kinerja (Sebuah Refleksi)*. (M. I. Patarai, Ed.) Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia: De La Macca. Retrieved Desember 18, 2023, From [Http://Eprints2.Ipdn.Ac.Id/391/1/Birokrasi%20akuntabilitas%20kinerja.Pdf](http://Eprints2.Ipdn.Ac.Id/391/1/Birokrasi%20akuntabilitas%20kinerja.Pdf)
- Pertahanan, K. (2017). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia. *Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia*. Jakarta: Sakip. Retrieved Desember 18, 2023, From [Https://Www.Kemhan.Go.Id/Renhan/Wp-Content/Uploads/2018/08/Sakip-2018-Bahan-Wibesite.Pdf](https://Www.Kemhan.Go.Id/Renhan/Wp-Content/Uploads/2018/08/Sakip-2018-Bahan-Wibesite.Pdf)
- Santoso, M. A. (2019, May 24). Otonomi Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Media Pengembangan Ilmu Dan Praktik Administrasi*, 6(4), 413-425. Doi:[Https://Doi.Org/10.31113/Jia.V614.3561](https://doi.org/10.31113/Jia.V614.3561)
- Simda, T. A. (N.D.). *Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (Bpkp)_Kawal Akuntabilitas Keuangan Dan Pembangunan*. (Deputi Ppkd) Retrieved Desember 19, 2023, From [Bpkp.Go.Id: Https://Www.Bpkp.Go.Id/Sakd/Konten/333/Versi-2.1.Bpkp](https://Www.Bpkp.Go.Id/Sakd/Konten/333/Versi-2.1.Bpkp)